

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Falun Dafa atau dikenal juga *Fa Lun Gong* merupakan kegiatan olah tubuh yang dipelopori oleh Guru Li Hongzhi. Falun Dafa diperkenalkan pertama kali di Tiongkok pada tahun 1992<sup>1</sup>. Para praktisi Falun Dafa mengklaim bahwa Falun Dafa memberikan dampak positif bagi tubuh dan jiwa. Selain mendapat kesegaran tubuh dan ketenangan jiwa, para pratisi menjadi lebih positif dalam memaknai kehidupan karena berkaitan dengan tiga kunci latihan Falun Dafa yaitu Sejati, Baik dan Sabar atau *Zhen-Shan-Ren*<sup>2</sup>. Ketiga kunci ini pula yang membedakan Falun dafa dengan kelompok kultivasi lainnya.

Falun Dafa dalam waktu singkat menjadi kegiatan olah tubuh yang sangat populer sehingga menyebar diseluruh daratan Tiongkok. Para pratiksipun datang dari berbagai kalangan pekerjaan. Seperti petani, pedagang, guru hingga kalangan pekerjaan menengah atas seperti para petinggi perusahaan, otoritas militer serta para politisi di Tiongkok. Falun Dafa dinilai berhasil muncul ditengah krisis kesehatan yang dilanda masyarakat Tiongkok. Sehingga tidak butuh waktu yang lama Falun Dafa

---

<sup>1</sup> Falun Dafa, *Pengenalan Singkat tentang Falun Dafa*, diakses dalam <http://id.falundafa.org/> (27/8/2017, 15:59WIB)

<sup>2</sup> Li Hongzhi, *Zhuan Falun*, diakses dalam [https://www.falundafa.org/eng/eng/pdf/zfl\\_new.pdf](https://www.falundafa.org/eng/eng/pdf/zfl_new.pdf) (06/9/2017, 15:12WIB) Hal 1

dapat menarik minat masyarakat Tiongkok. Keberhasilan Falun Dafa juga dapat dilihat dari para praktisi yang berasal hampir dari semua umur dari anak-anak hingga orang-orang lanjut usia. Walaupun lebih didominasi praktisi wanita dan usia lanjut.

Falun Dafa juga diklaim berhasil dalam membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Tiongkok. Sehingga tercatat oleh otoritas Tiongkok dalam meningkatkan kesehatan ribuan masyarakat usia lanjut di Tiongkok sehingga mampu menghemat anggaran kesehatan negara.<sup>3</sup>

Keberhasilan dan kesuksesan Falun Dafa tidak cukup bertahan lama. Memasuki tahun ke-enam pada 1999, dibawah pemerintahan Jiang Zemin<sup>4</sup> pemerintah Tiongkok mengeluarkan sebuah larangan tentang berlatih Falun Dafa. Diberbagai media cetak dan media elektronik Tiongkok Falun Dafa digambarkan sebagai organisasi baru yang menciptakan agama baru dan menyebarkan tahayul. Hal ini dipicu oleh aksi demo damai yang dilakukan oleh Falun Dafa pada 25 April 1999 didepan kantor *Chinese Communist Party* (CCP)<sup>5</sup> di Zhongnanhai-Beijing,<sup>6</sup> untuk membela hak-hak mereka dan meminta keadilan bagi para praktisi Falun Dafa lainnya yang mendapat perlakuan tidak adil oleh pihak kepolisian di Tiongkok. Namun, kegiatan tersebut malah dimaknai pemerintah sebagai kegiatan melawan pemerintah. Dikeluarkannya kebijakan larang pada 22 Juli 1999, setelah larangan itu dikeluarkan

---

<sup>3</sup> Cheris Shun-Ching Chan, *The Falun Gong in China: A sociological prespective*, diakses dalam <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0305741004000530> (05/9/2017,16:58WIB) Hal 666

<sup>4</sup> Jiang Zemin telah menjabat sebagai president Tiongkok sejak 1993 dan berhenti pada tahun 2003. Read more ([https://www.sps186.org/downloads/basic/588653/ch35\\_5.pdf](https://www.sps186.org/downloads/basic/588653/ch35_5.pdf))

<sup>5</sup> Selanjutnya akan disebut CCP

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal 679

terjadi penangkapan besar-besaran dan juga penganiayaan terhadap para praktisi yang diidentifikasi sebagai praktisi Falun Dafa.

Secara resmi setelah dikeluarkan 2 keputusan dari *General Secretary CCP* Jiang Zemin pada 20 Juli 1999.<sup>7</sup> Dimana dalam putusan tersebut pemerintah dengan jelas melarang tentang berlatih Falun Dafa diseluruh daerah di Tiongkok dan menganggap buku *Zhuan Falun* yang merupakan buku pedoman Falun Dafa sebagai buku yang membahas tentang takhayul dan dilarang penyebarannya serta memusnahkan buku-buku yang telah menyebar.

Tudingan juga datang dari pemerintah terhadap Guru Li Hongzhi yang menuduh pembentukan Falun Dafa sebagai partai oposisi CCP. Walaupun tudingan ini telah mendapat bantahan dari Guru Li Hongzhi. Para praktisi Falun Dafa bersikukuh bahwa mereka hanya merupakan perkumpulan kegiatan olah tubuh yang tidak memiliki tujuan politik, juga bukan sebuah agama.

Sejak isu ini terjadi(1999) hingga 2018, isu ini telah mendapat berbagai reaksi dari masyarakat internasional yang cukup besar. Hal ini berkaitan dengan menyebarnya isu Falun Dafa menjadi isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengambilan organ<sup>8</sup> yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. *Human Right Watch*

---

<sup>7</sup> Yiyang Xia, *The Illegality of China's Falung Gong Crackdown-and Today's Rule of Law Repercussions*, diakses dalam [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/droi/dv/506\\_yiyangxia\\_/506\\_yiyangxia\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/506_yiyangxia_/506_yiyangxia_en.pdf) (06/09/2017, 12:53WIB) Hal.2

Yiyang Xia Senior Director of Policy and Research at The Human Rights Law Foundations and Director of The Investigatio Division for The World Organisation to Investigate The Persecution of Falun Gong

<sup>8</sup> Hasil penelitian dari mantan sekretaris negara Kanada untuk Asia Pazifik David Kilgour serta pengacara HAM internasional David Matas yang melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan pengambilan organ secara paksa oleh pemaerintah Tiongkok dan perdagangan organ secara ilegal dari

dalam pemberitaannya juga menyatakan keprihatinannya terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok tentang pelarangan serta penangkapan praktisis Falun Dafa. *Human Right Watch* berpendapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok merupakan kebijakan yang melanggar ‘Standar’ hak asasi manusia yang dimuat dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)<sup>9</sup>, yang telah ditandatangani oleh pemerintah Tiongkok sendiri. Berbagai desakan juga mulai bermunculan. Salah satunya muncul desakan terhadap Komisaris Tinggi PBB untuk Hak asasi Manusia, Mary Robinson untuk melakukan intervensi terhadap para otoritas tertinggi di Beijing<sup>10</sup> yang datang dari masyarakat internasional dan juga para praktisi Falun Dafa yang tinggal diluar kawasan Tiongkok. Besarnya isu Falun Dafa, membuat para ilmuan dari berbagai bidang melakukan penelitian mengenai isu ini. Selain itu baik organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan seperti *Amnesty internasional*, *Human Right Watch* dan komisi eksekutif kongres USA di Tiongkok juga turut mencermati perkembangan mengenai isu Falun Dafa. Disini kita bisa melihat bagaimana isu Falun Dafa muncul sebagai isu yang berdampak pada posisi Tiongkok dikancah internasional.

Hingga penelitian ini ditulis(2018) isu mengenai Falun Dafa masih belum menemukan titik terang yang pasti, karena masih banyak dari pratiksi Falun Dafa Tiongkok yang ditangkap pada 1999 masih dinyatakan hilang oleh keluarganya.

---

terpidana Falun Dafa pada tahun 2000-2005. Hasil penelitian ditulis dalam sebuah buku *Laporan Dugaan Pengambilan Organ Pratiksi Falun Gong di China*.

<sup>9</sup> *Human Right Watch, China Uses ‘Rule of Law’ to Justify Falun Gong Crackdown*, diakses dalam <https://www.hrw.org/news/1999/11/09/china-uses-rule-law-justify-falun-gong-crackdown>, (17/04/2018) 12:19WIB

<sup>10</sup> Ibid.

Hal yang membuat isu ini menarik untuk diteliti tentang bagaimana proses pelabelan isu Falun Dafa di Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok. Sehingga isu ini diindikasikan sebagai isu yang mengancam pemerintah Tiongkok dan muncul sebagai salah satu isu domestik yang bersifat mendesak dan mengancam posisi Tiongkok.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian adalah ‘Bagaimana proses pelabelan pemerintah Tiongkok terhadap isu Falun Dafa?’

## **1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan proses pelabelan terhadap isu Falun Dafa oleh pemerintah Tiongkok sehingga dikeluarkannya larangan tentang berlatih Falun Dafa.

### **1.3.2 Manfaat Akademis**

Manfaat akademis penelitian ini dapat memperkaya bahan penelitian maupun informasi dalam studi Hubungan Internasional khususnya mengenai isu-isu non-tradisional. Seperti isu keamanan yang berasal dari kelompok Qigong di Tiongkok. Memberikan sudut pandang berbeda mengenai isu Falun Dafa dari perspektif pemerintah Tiongkok. Selain itu penulis juga berharap dapat menjadi salah satu acuan akademis untuk mendalami isu-isu berkaitan dengan topik yang berkaitan dengan Falun Dafa.

### 1.3.3 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan wawasan disiplin ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai isu kebijakan pemerintah Tiongkok dalam pelarangan Falun Dafa di Tiongkok.

### 1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan dengan topik, teori atau permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu bertujuan menjelaskan posisi penelitian ini dengan penelitian yang lainnya.

Penelitian terdahulu pertama adalah Thesis yang ditulis oleh *Dwi Winarno* dengan judul *Gerakan Falun Gong di Indonesia* dari Universitas Indonesia tahun 2012.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas tentang gerakan-gerakan sosial oleh praktisi Falun Dafa yang muncul di Indonesia pasca 1999. Dimana setelah pelarangan Falun Dafa di Tiongkok berusaha melakukan aksi demo damai. Namun, aksi damai ini malah menjadi ketakutan bagi pemerintah Tiongkok karena pada aksi damai tersebut Falun Dafa mampu mengumpulkan masa yang cukup banyak sehingga pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Tiongkok berusaha menekan lebih keras terhadap larangan Falun Dafa. Aksi dukungan dan pembelaan terhadap praktisi Falun Dafa datang dari

---

<sup>11</sup> Dwi Winarno, *Falun Dafa di Indonesia*, diakses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20303968-T30797-Dwi%20Winarno.pdf> (23/11/2017, 01:00 WIB)

praktisi Falun Dafa berbagai negara salah satunya berasal dari Indonesia. Di Indonesia, Falun Dafa telah dikenal sejak tahun 1995.

Falun Dafa dinilai sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki sistem komunikasi *Well-development* hal ini dapat dilihat dari kemampuan Falun Dafa yang mana menggerakkan masa yang begitu banyak. dengan menggunakan dua teori yaitu *New Social Movement* dan *New Religious Movement* peneliti melihat Falun Dafa lahir menjadi salah satu kelompok yang besar, valid dan solit. Sehingga pada saat Falun Dafa mendapatkan respon dari pemerintah Tiongkok yang represif, Falun Dafa tumbuh menjadi gerakan sosial yang bertujuan politik yaitu menentang perbuatan pemerintah Tiongkok terhadap Falun Dafa. Pada awalnya gerakan sosial ini hanya terjadi di Tiongkok. Namun, melihat aksi-aksi damai yang dilakukan partis Falun Dafa di Tiongkok malah mendapat tekanan dari pemerintah Tiongkok maka muncullah gerakan sosial serupa diseluruh dunia salah satunya Indonesia. Di Indonesia Falun Dafa membentuk badan organisasi HFDI (Himpunan Falun Dafa Indonesia). Organisasi ini dibentuk hanya untuk memenuhi dan mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan gerakan sosial Falun Dafa memiliki beberapa tuntutan diantaranya adalah tuntutan agar pemerintah Tiongkok menghentikan penindasan terhadap pratiksi Falun Dafa di Tiongkok. Lalu meminta para politisi era Jiang Zemin dihukum atas perlilaku yang tidak manusiawi selain itu pemerintah Indonesia diminta memutuskan hubungan kerjasama dengan Tiongkok. Gerakan sosial Falun Dafa di Indonesia

dikelompokkan sebagai gerakan sosial transnasional karena menyebar dan menjalin kerjasama dengan Falun Dafa dinegara lainnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada isu yang dibahas, jika penelitian diatas membahas isu mengenai Gerakan Sosial Falun Dafa di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang alasan yang mendasari keputusan pemerintah Tiongkok melarang Falun Dafa di Tiongkok.

Penelitian kedua berasal dari *Interational Jurnal of Legal Informations* , *The international association of law libraries* by Michael Greenlee pada tahun 2006 dengan judul *A King Who Devours His People: Jiang Zemin and The Falun Gong Crackdown: A Bibliography*.<sup>12</sup> Dalam Jurnal ini Michael menceritakan tentang awal Falun Dafa terbentuk dan hingga dilarang oleh pemerintah Tiongkok dimasa pimpinan Jiang Zemin. selain itu dalam jurnal ini juga dibahas pasca Falun Dafa dilarang hingga usaha-usaha yang dilakukan untuk menuntut pemerintah Tiongkok atas kekerasan dan penangkapan yang tidak masuk akal terhadap praktisi Falun Dafa di Tiongkok. Kesamaan penelitian ini dan juga penelitian yang penulis teliti adalah topik pembahasan yang sama-sama membahas tentang Jiang Zemin yang pada saat isu Falun Dafa terjadi merupakan pemimpin dari Tiongkok. Sedangkan yang membedakan jurnal ini dan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus pembahasan dimana peneliti akan menganalisa alasan pemerintah Tiongkok melarang kegiatan Falun Dafa

---

<sup>12</sup> Michael Greenlee, *A King Who Devours His People: Jiang Zemin and The Falun Gong Crackdown: A Bibliography*, diarses dalam <http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=ijli> (23/11/2017, 00:53 WIB)



di Tiongkok, bukan melihat Jiang Zemin sebagai pengambil keputusan namun pemerintah Tiongkok secara khusus. Sedangkan Jurnal ini hanya sebatass menceritakan secara ringkas proses panjang terbentuknya hingga pasca dikeluarkanya larangan berlatih Falun Dafa di Tiongkok.

Penelitian yang ketiga berasal dari Jurnal yang ditulis oleh Chin-Yunn Yang, New York University dengan judul *The Perfect Example of Political Propaganda: The Chinese Government's Persecution Against Falun Gong*.<sup>13</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti tarletak pada isu yang dibahas. Hanya saja dalam jurnal ini lebih memfokuskan tentang bagaimana pemerintah Tiongkok menggunakan media sebagai alat propaganda dengan melakukan manipulasi opini untuk menentang Falun Dafa. Propaganda ini muncul pasca dilarangnya Falun Dafa di Tiongkok pada tahun 1999 oleh presiden Jiang Zemin. Dari televisi, radio dan surat kabar secara berulang menyiarkan atau memberitakan tentang manipulasi yang dilakukan Falun Dafa. Pemerintah juga melakukan pemblokiran terhadap sumber berita yang berasal dari luar maupun situs-situs Falun Dafa yang ada. Propaganda dilakukan dengan memanfaatkan segala teknis yang ada dari pers, radio, TV, film, poster, rapat bahkan pengintaian pintu ke pintu. Pemerintah melakukan doktrin kepada setiap orang untuk menunjukkan sikap yang benar terhadap Falun Dafa. Selain menggunakan media masa

---

<sup>13</sup>Chin Yunn Yang, *The Perfect Example of Political Propaganda The Chinese Government's Persecution Against Falun Gong*, diakses dalam <http://www.globalmediajurnal.com/open-access/the-perfect-example-of-political-propaganda-the-chinese-governments-persecution-against-falun-gong.php?aid=35171> (23/11/2017, 23:07 WIB)

sebagai alat propaganda pada tahun 2001. Pemerintah juga melakukan praktek bunuh diri yang diidentifikasi dilakukan oleh Falun Dafa.

Literatur yang keempat berasal dari *Massey University* ditulis oleh Heather Kavan<sup>14</sup> dengan judul *Falun Gong in The Media: What can we believe?*.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang akurasi media barat dan Tiongkok mengenai gerakan agama baru Falun Dafa. Setelah dilarangnya Falun Dafa di Tiongkok munculnya ribuan berita dimedia Tiongkok yang nentang Falun Dafa, yang sedikit berbeda dengan pemberitaan media barat yang tidak terlalu memojokkan para praktisi Falun Dafa. Penelitian ini menggunakan metode *Symbolic realism*. Dengan membandingkan dan mengumpulkan data dari media massa Tiongkok dan barat. Serta melakukan pendekatan dengan kelompok Falun Dafa di New Zealand.

Fakta yang ditemukan dalam perbedaan laporan antara media barat dan Tiongkok diantaranya media barat menggambarkan bagaimana Falun Dafa dilarang dikarenakan meningkatnya kepopuleran Falun Dafa dengan anggota yang lebih dari jumlah CCP, sedangkan media Tiongkok menggambarakan larangan Falun Dafa karena telah melanggar beberapa hukum yang ada di Tiongkok. Selain itu juga terdapat penggambaran dalam isu pelanggaran HAM. Dimana media barat menggambarkan tentang para praktisi yang mendapat kekerasan dan penganiyayan bahkan banyak foto dan basil wawancara. Sedangkan dimedia Tiongkok yang menentang tentang adanya

---

<sup>14</sup> Dr. Heather Kavan is lecturer in the Department of Communication, Journalism and Marketing at Massey University, New Zealand.

<sup>15</sup> Heater Kavan, Massey University, *Falun Gong in Media: What , Can We Believe?*, diakses dalam [https://www.massey.ac.nz/massey/fms/Colleges/College%20of%20Business/Communication%20and%20Jurnalism/ANZCA%202008/Refereed%20Papers/Kavan\\_ANZCA08.pdf](https://www.massey.ac.nz/massey/fms/Colleges/College%20of%20Business/Communication%20and%20Jurnalism/ANZCA%202008/Refereed%20Papers/Kavan_ANZCA08.pdf), (07/02/2018, 12:20WIB)

pelanggaran maupun kekerasan yang dilakukan pihak polisi Tiongkok dengan penggambaran kepolisian yang dilakukan media Tiongkok. Perbedaan ini bisa disebabkan dengan berbedanya kepentingan, nasional dan ideologi yang dianut.

Penelitian dahulu kelima berasal dari CRS Report for Congress dengan judul *China and Falun Gong*, yang ditulis oleh Thomas Lum, pada 2006<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini berisikan tentang secara umum bagaimana isu Falun Dafa ini mulai menyebar menjadi isu pelanggaran HAM yang membuat U.S ikut menekan pemerintah Tiongkok mengenai isu Pengambilan organ secara ilegal yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Serta membahas bagaimana Falun Dafa paska dikeluarkannya UUD larangan Falun Dafa di Tiongkok.

Penelitian terdahulu keenam berasal dari Yuezhi Zhao dengan judul *Falun Gong, Identity, and The Struggle Over Meaning Inside and Outside China*<sup>17</sup>. Dalam pembahasan ini berfokus pada bagaimana konflik antar Falun Dafa dan pemerintah Tiongkok dimulai dari media massa yang bertepatan pula pada saat itu Tiongkok sedang gencar-gencarnya memperkenalkan peluang usaha melalui media cetak dan audiovisual. Pemerintah Tiongkok juga memiliki peraturan tersendiri tentang syarat pencetakan buku. Namun, dikarenakan sulitnya mendapat akses pada berita-berita yang disetujui oleh pemerintah dan juga minat masyarakat semakin tinggi terhadap Falun Dafa setelah diberi legitimasi oleh pemerintah Tiongkok. Banyak dari rumah

---

<sup>16</sup> Thomas Lum, CRS Report for Congress, *China and Falun Gong*, diakses dalam [https://www.everycrsreport.com/files/20060525\\_RL33437\\_780b0dedd723daa0264eff6178dfe7e235b727e9.pdf](https://www.everycrsreport.com/files/20060525_RL33437_780b0dedd723daa0264eff6178dfe7e235b727e9.pdf) (11/04/2018) 13:41 WIB

<sup>17</sup> Yuezhi Zhao, *Falun Gong, Identity and The Struggle Over Meaning Inside and Outside China*, diarsipkan dalam [https://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao\\_y/assets/14\\_03-168\\_Ch13.pdf](https://www.sfu.ca/cmns/faculty/zhao_y/assets/14_03-168_Ch13.pdf) (23/05/2018) 09:47 WIB

produksi percetakan bawah tanah yang mulai mencetak informasi yang berkaitan dengan Falun Dafa. Melihat banyaknya minat dan juga pengaruh kekuasaan yang dimiliki Falun Dafa. Pemerintah pada tahun 1996 mulai mengeluarkan tentang larangan percetakan buku Falun Dafa dan mulai lah muncul beberapa artikel yang membahas Falun Dafa secara negatif. Sehingga demo damai untuk menuntut media Tiongkok pun terjadi. Hingga tahun 1999, Falun Dafa resmi dilarang oleh Pemerintah Tiongkok. Dilarangnya Falun Dafa di Tiongkok membuat para praktisi luar negeri berusaha membangun suport bagi praktisi Tiongkok dengan menekan pemerintah Tiongkok melalui media masa yaitu Internet. Seperti World Falun Dafa Radio, [www.minghui.org](http://www.minghui.org), [www.clearnet.org](http://www.clearnet.org), Faguangming TV (FGMTV), dan masih banyak lagi. Internet menjadi sebagai sarana perlawanan yang moderen. Falun Dafa tetap bersikukuh dengan tuntutan terhadap pemerintah Tiongkok tentang keadilan dan propaganda bersih, menuntut pengembalian nama baik Falun Dafa dan mencabut segala tuduhan negatif yang dilabel kan terhadap praktisi Falun Dafa. yang membedakan penelitian ini dengan penlitian *Yuezhi Zhao* teletak pada fokus pembahasannya yang lebih pada penggunaan media dalam propaganda dan proses pemberitaan.

Penelitian ketujuh berasal dari penelitian skripsi Ibkar Madi dari Universitas Muhammadiyah Malang, 2018 yang berjudul *Sekuritisasi Halklarin Demokratik Partisi Oleh Recep Tayyip Erdogan di Tahun 2015*<sup>18</sup>. Penelitian ini berisi tentang

---

<sup>18</sup> Ibkar Madi, Skripsi, *Sekuritisasi Halklarin Demokratik Partisi Oleh Recep Tayyip Erdogan di Tahun 2015*, Universitas Muhammadiyah Malang.

penyebaran etnis Kurdi di Turki sejak periode 639 M. Namun sejalan dengan kedaulatan yang didapat oleh pemerintah Turki. Walaupun etnis Kurdi mendapat kewarganagaraan di Turki namun dengan adanya kemerdekaan turki membuat pergerakan etnis Kurdi semakin sempit yang menginginkan otonomi daerah. Selain itu kebijakan pemerintah Turki dianggap membatasi etnis Kurdi di Turki. Merasa dirugikan secara sosial politik oleh pemerintah turki etnis Kurdi terus melakukan beberapa perlawanan seperti pada tahun 1925, 1926 hingga 1960. Hingga pada tahun 1980an Partai Karkeren Kurdistan(PKK) muncul dengan tuna memperjuangkan hak para Kurdi dengan jalur politik. PKK juga membentuk pasukan griliya untuk melawan pamerintah Turki baik melalui politik dan militer. Hingga pada tahun 2013 gencatan senjata disepakati oleh PKK. Pada masa pemerintahan Erdogan. Erdogan berusaha berdamai dengan etnis Kurdi dengan memberikan hak-hak suara dalam politik dan media. Namun, usaha damai pemerintah tidak memberikan efek yang positif . Sehingga Erdogan berusaha menekan gerakan Kurdi dengan jalur politik dan non-politik. Cara pandang Erdogan terhadap etnis Kurdi yang menganggap partai Halkarin Demokratik Partisi (HDP) bukan ancaman keamanan hanya sebatas ancaman politik. Melihat partai HDP yang untuk pertama kalinya mendapatkan kursi diparlemen. Merubah pandangan tentang HDP yang dinilai sebagai entitas ancaman seperti PKK. Hingga pada tahun 2015 Erdogan melakukan sekuritisasi terhadap HDP. Dimulai dari insiden bom bunuh diri pada 20 juli 2015. Sebelum insiden terjadi Erdogan menyatakan ketidak setujuannya atas Dolmabahce Agreement yang merupakan usage negosiasi pemerintah dengan partai HDP. Dalam sebuah wawancara

pada 17 juli 2015 Erdogan menolak kredibilitas kesepakatan tersebut dan menuduh HDP sebagai perpanjangan tangan PKK. setelah penolakan ini munculnya teror yang dilakukan PKK. pada wawancara 21 juli 2015 Erdogan menyatakan perlawanan pemerintah turki terhadap segala bentuk teror. Namun dalam pernyataan tersebut kita bisa melihat bagaimana Erdogan lebih cenderung terhadap penanganan PKK. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Erdogan berdasarkan teori sekuritisasi ditandai oleh tindakan *Speech Act* dengan Erdogan sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi. Sehingga pemerintah Turki melakukan tindakan kusus dalam menangani isu teror yang di lakukan HDP sebagai kepanjangan tangan PKK.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian**

No	Judul	Teori/Konsep & Metodologi	Hasil
1	Dwi Winarno (Tesis: Gerakan falun gong di Indonesia)	Teori: - <i>New Social Movement</i> - <i>New Religious Movement</i> Metodologi: Kwalitatif	Falun Dafa Indonesia muncul sebagai salah satu gerakan transnasional, dengan tujuan menentang perbuatan pemerintah Tiongkok yang melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap praktisi Falun Dafa di Tiongkok. Munculnya gerakan pendukung Falun dafa ini pemerintah Tiongkok melakukan pendekatan secara diplomasi terhadap berbagai negara yang terdapat gerakan ini. Dengan mengangkat isu HAM dan melakukan tuntutan oleh pejabat-pejabat di masa pemerintah Jiang Zemin.  Penelitian ini sama-sama meneliti tentang Falun Dafa, dan berfokus pada sosial movement yang ada di Indonesia.

2	<p>Michael Greenlee (<i>The international association of law libraries: A King Who Devours His People: Jiang Zemin and The Falun Gong Crackdown: A Bibliography</i>)</p>	<p>Gerakan Falun Gong di Tiongkok merupakan salah satu dari 'Qigong boom' yang terjadi di era 1980an dan Master Li Hongzhi sebagai pencetus gerakan ini. Pada masa pemerintah Jiang Zemin pada tahun 1999 dikeluarkannya kebijakan baru tentang larangan berlatih Falun Dafa. Dimana kebijakan ini mendapat respons penolakan yang dinilai sebagai gerakan pemberontakan Falun Dafa terhadap pemerintah pada saat itu yang membuat pemerintah lebih agresif dengan melakukan penahanan. Setelah beberapa tahun isu ini masih banyak praktisi yang dinyatakan hilang dan tergolong isu yang sensitif di Tiongkok.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada isu yang dibahas namun lebih berfokus pada aktor pembuat kebijakan yaitu Jiang Zemin.</p>
3	<p>Chin-Yunn Yang (Jurnal: <i>The Perfect Example of Political Propaganda: The Chinese Government's Persecution Against Falun Gong</i>)</p>	<p>Dalam menghadapi isu Falun Dafa di Tiongkok. Di bawah pemerintahan Jiang Zemin pemerintah berusaha melakukan pengontrolan opini publik melalui berbagai cara diantaranya dengan menggunakan media massa yang ada di Tiongkok baik Radio, TV, dan Cetak. Media pada masa itu digunakan sebagai alat brainwash oleh pemerintah Tiongkok.</p> <p>Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada isunya. Dan perbedaannya terletak pada peran Media Massa pada saat itu</p>

4	Heather Kavan  ( <i>Paper: Falun Gong in Media: What Can We Believe?</i> )	Symbolic realism	<p>Setelah dilarangnya Falun Dafa di Tiongkok muncul berbagai berita baik dari media Tiongkok dan barat. Media-media ini memiliki penggambaran berbeda dalam isu ini.</p> <p>Penelitian ini berfokus pada bagaimana media Tiongkok dan Barat melakukan penggambaran yang berbeda terkait isu Falun Dafa</p>
5	Thomas Lum  (CSR Report for Congress: China and Falun Gong)		<p>Dikeluarkannya larangan terhadap Falun Dafa di Tiongkok mendapat berbagai reaksi salah satunya pemerintah <i>United State</i>. U.S melalui kedutaanya di Beijing. Menyatakan penolakan atas keputusan pemerintah Tiongkok yang dinilai telah melanggar Hak Asasi warganya. Selain itu kedutaan U.S dan Konsulatnya juga melakukan inspeksi di rumah sakit yang diisukan disalah gunakan fungsinya oleh pemerintah Tiongkok sendiri.</p> <p>Penelitian ini lebih berfokus bagaimana isu Falun Dafa mendapatkan respon dari pihak luar berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Tiongkok.</p>
6	Yuezhi Zhao <i>Falun Gong, Identity, and The Struggle Over Meaning Inside and Outside China</i>		<p>Penelitian ini lebih berfokus tentang bagaimana penggunaan media sebagai sarana perdebatan dan sarana perlawananan para praktisi Falun Dafa. Dalam penelitian ini penulis berfokus tentang bagaimana awal mula konflik hingga dilarangnya Falun Dafa di Tiongkok diawali dari media massa. Hingga dikeluarkan larangan Falun Dafa di Tiongkok pun. Praktisi Falun Dafa menggunakan media massa (Internet) untuk mengarahkan opini publik dan meneruskan tuntutan terhadap pemerintah Tiongkok akan keadilan dan juga propaganda baik.</p> <p>Penelitian ini lebih berfokus tentang bagaimana penggunaan media sebagai sarana perlawananan ideologi dalam kasus Falun Dafa dan Pemerintah Tiongkok.</p>



7	Ibkar Mahi <i>Sekuritisasi Halklarin Demokratik Partisi Oleh Recep Tayyip Erdogan di Tahun 2015</i>	Teori: Sekuritization	Menyebarnya etnis kurdis di Turki yang terus menuntut otonomi dan hak-hak mereka hingga melakukan agresi militer membuat pemerintah semakin mengecilkan pergerakan atau wewenang etnis kurdi yang muncul menjadi partai PKK dan HDP. Mendapat kursi suara lebih dari 10% diparlemen serta pengajuan negosiasi damai terhadap PKK membuat Erdogan sebagai aktor sekuritisasi mengeluarkan Speech Act nya dalam bebrapa pernyataan wawancara. Hal ini juga memicu aksi teror yang disinyalir berasal dari HDP sebagai kepanjangan tangan PKK. Melihat aksi teror yang terus terjadi proses sekuritisasi terjadi terhadap isu teror yang dilakukan oleh HDP.  Penelitian ini berfokus pada Speech Act yang dilakukan Erdogan sebagai aktor sekuritisasi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus pada rututan proses sekuritisasi terhadap isu Falun Dafa.
---	--	--------------------------	--

## 1.5 Konsep

Kerangka teori yang digunakan peneliti untuk menganalisa proses pelabelan isu Falun Dafa yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Peneliti menggunakan konsep pelabelan.

### 1.5.1 Pelabelan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep pelabelan(*Speech Act*) dalam menganalisa proses pelabelan yang dilakukan pemerintah Tiongkok dalam isu Falun Dafa. Konsep pelabelan ini sendiri pada merupakan dari bagian teori sekuritisasi yang berkembang setelah berakhirnya perang dunia dingin yang memunculkan

perdebatan 'Narrowers'<sup>19</sup> dan 'Wideners'<sup>20</sup>, tentang keamanan di ilmu Hubungan Internasional. Menurut para Wideners isu keamanan saat ini tidak hanya seputar militer saja. Secara teoritis para Narrowers berpendapat, '*Security as a freedom from any objective military threat to the state survival in an anarchic international system*'.<sup>21</sup> Menegaskan bentuk ancaman merupakan ancaman yang dapat mengancam sistem internasional dan berasal dari militer. Sedangkan menurut salah satu pemikir dari Wideners yaitu Barry Buzan bahwa '*Security is pursuit of freedom from threats*'<sup>22</sup> Dimana Buzan melihat nilai ancaman telah bergeser dan tidak hanya berpaku pada negara dan militer.

Para Wideners berpendapat keamanan nasional dihasilkan dari bentukan yang diciptakan oleh para politisi dan pembuat kebijakan lainnya dalam sebuah negara.<sup>23</sup> Buzan berpendapat pelabelan adalah proses perubahan isu normal ke high politik yang membutuhkan tindakan khusus. Proses pelabelan juga dipahami sebagai *inter-subjective proses*, dimana proses penilaian antar kelompok kepentingan secara

<sup>19</sup> Narrowers atau sering dibidang tradisional merupakan kelompok pemikir yang muncul di era perang dingin yang berfokus pada ancaman militer dan keamanan politik. Read more

<http://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/> (17/05/2018) 12:48WIB

<sup>20</sup> Wideners atau sering dikenal sebagai konstruktivis merupakan kelompok pemikir paska perang dingin yang berfokus bahwa ancaman tidak hanya seputar pada militer dan politik. Tetapi juga keamanan manusia dan wilayah. Read more

<http://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/> (17/05/2018) 12:48WIB

<sup>21</sup> Vladimir Sulovic, Belgrade Centre for Security Policy, *Meaning of Security and Theory of Securitisation*, diarsipkan dalam

[http://www.bezbednost.org/upload/document/sulovic\\_%282010%29\\_meaning\\_of\\_secu.pdf](http://www.bezbednost.org/upload/document/sulovic_%282010%29_meaning_of_secu.pdf) (20/01/2018, 10:01WIB), Hal 2

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hal 1

<sup>23</sup> Clara Eroukhmanoff, E-International Relations Students, *Securitisation Theory: An Introduction*, diakses dalam <http://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/> (17/05/2018) 12:48WIB

Clara Eroukhmanoff is Lecturer in International Relations at London South Bank University, UK. She is co-editor of *Reflections on the Postman in International Relations* (2017), diarsipkan dalam (<http://www.e-ir.info/author/clara-eroukhmanoff/>)

*subjectif* tentang sebuah kepentingan atau ancaman. Dapat dipahami juga *inter-subjectif* proses tentang bagaimana sebuah negara dalam mengidentifikasi 'nilai ancaman' berbeda-beda tergantung dari kepentingan sebuah negara itu sendiri serta bagaimana seorang aktor negara memandang dan memahami nilai ancaman yang muncul.

Proses pelabelan diawali ketika seorang aktor politik melakukan identifikasi sebuah isu yang dianggap mengancam didalam komunitas politik atau publik. Setelah identifikasi, aktor politik akan mengarahkan opini publik. Pembentuk opini dibutuhkan untuk menjustifikasi terhadap proses yang akan dilakukan aktor politik ditahap selanjutnya. Pengarahan opini publik ini diperlukan untuk menciptakan pemahaman bahwa dampak dari isu tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat serta mampu mengancam eksistensi negara-bangsa.. Pembentukan opini publik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui media massa. Setelah nilai pemahaman terhadap ancaman telah dipahami bersama dan disepakati maka memungkinkan untuk meningkatkan respon politik terhadap isu tersebut agar mendapatkan penanganan yang khusus. Perubahan penanganan dari politik normal ke politik darurat dapat dilakukan tanpa harus melalui proses birokrasi yang telah ada.

Holger Stritzel menambahkan dalam *Security in Translation*, pelabelan dapat dilihat dari 4 Tipologi yaitu

1. Klaim: Pendeskripsian sebuah isu ancaman,
2. Peringatan: Menjelaskan bagaimana isu tersebut dapat berubah menjadi ancaman,

3. Permintaan: Merencanakan sebuah tindakan,
4. Konten Proposisi: Menunjukkan bukti atau pembenaran atas tindakan tersebut<sup>24</sup>

Dalam analisa isu ini peneliti akan berfokus pada proses pelabelan yang dilakukan terkait Falun Dafa yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Sehingga pada 22 Juli 1999, Kementrian keamanan publik<sup>25</sup> dan kementrian urusan sipil Tiongkok mengumumkan secara resmi melarang Falun Dafa dan mendeklarasikan Falun Dafa sebagai kelompok ilegal<sup>26</sup>. Bersamaan dengan pernyataan tersebut pemerintah Tiongkok mulai melarang adanya latihan, perkumpulan, buku, banner dan mulai memblokir akses pada website resmi Falun Dafa. Sejak terbentuknya Falun Dafa ditahun 1992 Falun Dafa muncul sebagai kelompok sosial yang besar dan cukup solid. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan praktisinya yang terus meningkat. Namun, bertambahnya jumlah keanggotaan ini memberi ancaman bagi pemerintah Tiongkok. Wakil president Hu Jintao(1999) sedikitnya sepertiga anggota CCP juga merupakan praktisi dari Falun Dafa<sup>27</sup>. Selain itu tidak sedikit orang-orang pemegang kekuasaan dipemerintahan dan militer yang bergabung dengan Falun Dafa. Memiliki jumlah pratisi

---

<sup>24</sup>Holger Strzel, *Security in Translation*, Newyork:Palgrave macmillan, Hal 49

<sup>25</sup> Human Right Watch, *China Uses ;Rules of Law ' to Justify Falun Gong Crackdown*, diakses dalam <https://www.hrw.org/news/1999/11/09/china-uses-rule-law-justify-falun-gong-crackdown> (21/02/2018) 11:08WIB

<sup>26</sup>Harload White Fellow, Benjamin Penny,National Library of Australia, *The Past, Present and Future of Falun Gong*, diakses dalam <https://www.nla.gov.au/benjamin-perry/the-past-present-and-future-of-falun-gong#bm3> (21/02/ 2018), 3:22WIB

<sup>27</sup> Congressional Research Service, *China and Falun Gong*, diakses dalam [https://www.everycrsreport.com/files/20060811\\_RL33437\\_7a2c8c5e3d6287ac5ca9789e4c6486617b886f59.pdf](https://www.everycrsreport.com/files/20060811_RL33437_7a2c8c5e3d6287ac5ca9789e4c6486617b886f59.pdf) (21/02/2018), 09:49WIB

yang cukup besar, kemampuan menggerakkan massa secara besar dan memiliki pemahaman yang dinilai berbeda dengan CCP. Falun Dafa diindikasikan sebagai kelompok sosial yang dapat mengancam CCP.

Proses pelabelan terhadap Falun Dafa diawali dengan respon pemerintah Tiongkok yang mengadakan rapat darurat menanggapi aksi demo damai yang dilakukan Falun Dafa pada 19 April 1999. Proses pelabelan oleh pemerintah Tiongkok berlangsung selama 4 bulan dengan menggunakan media massa sebagai alat pembentuk opini masyarakat Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari mulai munculnya pemberitaan-pemberitaan negatif tentang Falun Dafa di media. Proses pelabelan ini berlanjut hingga dikeluarkannya larangan terhadap Falun Dafa oleh kementerian urusan sipil yang ditandatangani oleh kementerian keamanan setempat pada 22 Juli 1999.

### **1.6. Metode Penelitian**

Pada dasarnya, sebuah penelitian dilakukan untuk mendalami dan mencari sebuah jawaban dalam merespon sebuah fenomena, kejadian maupun isu, begitupula dasar dari penelitian ini. Metode penelitian merupakan salah satu aspek yang penting dalam melakukan penelitian karena hal ini dapat membantu penelitian dengan hasil yang akurat dan membuat penelitian lebih sistematis. Secara etimologi, metodologi dari bahasa Yunani yakni *Methodos* yang artinya *Metode* dan *Logos* yang artinya pola pikir, cara pandang ataupun nalar.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Umar Suryadi Bakry, 2016, *Metode penelitian hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar:Jogja, Hal 2

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Explanatif. Menurut Ulber Silalahi penelitian explanatif merupakan penelitian yang diawali dari pertanyaan ‘Mengapa, Bagaimana’. Dalam jenis penelitian ini berfokus pada penjelasan mengapa sebuah peristiwa itu bisa terjadi melalui penelitian beberapa variabel yang berkaitan.<sup>29</sup> Penelitian ini juga berfokus tentang hubungan antar variabel, dimana dalam penelitian ini antara variabel dependent dan independent saling berhubungan dan berkertaitan. Dimana dari dua variabel ini akan membantu peneliti dalam membangun Hipotesa. Sehingga, dalam penelitian ini akan menjelaskan mengapa pemerintah Tiongkok melarang Falun Dafa di Tiongkok berdasarkan teori *Non-Traditional Security*.

### **1.6.2. Metode Analisa**

Metode analisa penelitian digunakan adalah metode analisis kualitatif. Menurut Michael Patton dan Michael Cochran, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan pemahaman beberapa aspek kehidupan sosial dan metode yang digunakan biasanya akan menghasilkan kata-kata sebagai data analisis dan bukan angka.<sup>30</sup>

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan data-data yang bersumber dari dokumentasi, pendalaman pustaka dan data sekunder ataupun data primer yang didapatkan dari internet, surat kabar dan selebaran, yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian kualitatif dipergunakan dalam memahami penelitian yang

---

<sup>29</sup> Ulber silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT.Refika Aditama, Hal.30.

<sup>30</sup> Op. Cit., Umar hal 16

membahas permasalahan sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran secara lengkap dan keseluruhan yang dibentuk dengan kata-kata yang disusun secara terperinci dan memiliki latar belakang yang ilmiah.<sup>31</sup>

### **1.6.3. Ruang Lingkup Penelitian**

#### **Batasan Materi**

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dalam penelitian ini penulis membatasi batasan materi melingkupi isu-isu yang berkaitan dengan proses pelabelan sehingga pemerintah Tiongkok mengeluarkan larangan adanya kegiatan Falun Dafa atau Falun Gong di Tiongkok.

#### **Batasan Waktu**

Dengan batasan waktu yang dipilih penulis yaitu dari tahun 1992 hingga 1999. Batasan ini dipilih dari awal terbentuknya Falun Dafa pada tahun 1992, lalu 1996 dimulainya proses penglabelan hingga pada 1999 dikeluarkannya kebijakan pemerintah terhadap pelarangan kegiatan Falun Dafa.

### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat studi pustaka untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari literatur, buku, artikel, jurnal, berita, selebaran, website berita, jurnal maupun tulisan ilmiah lainnya yang dapat menunjang penelitian ini. Studi pustaka ini dilakukan baik di

---

<sup>31</sup> Masri Singarimbu dan Sofian Efendi, Ed. 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES, Hal 5, dalam Ibid. Hal.77.

Perpustakaan Muhammadiyah Malang, Laboratorium Hubungan Internasional Muhammadiyah Malang, Perpustakaan Kota Malang, Media cetak maupun melalui Internet.

### **1.7. Hipotesa**

Penggunaan konsep pelabelan akan membantu menjelaskan tentang proses perubahan status status isu normal menjadi *high politic* Falun Dafa.

Munculnya Falun Dafa dengan jumlah masa yang cukup besar serta kemampuan pergerakan masa dengan mengusung paham ideologi yang dianggap berbeda dengan ideologi partai menjadikan Falun Dafa sebagai ancaman baru bagi CCP. Sehingga pemerintah mengidentifikasi Falun Dafa sebagai ancaman baru yang berasal dari lingkup sosial dan level individu. Sehingga proses pelabelan Falun Dafa dilakukan dan pelarangan terhadap kegiatan Falun Dafa dikeluarkan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

BAB I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , penelitian terdahulu, konsep , metodologi penelitian dan hipotesa dalam penelitian ini. Di BAB II berisi tentang gambaran sistem pemerintahan Tiongkok, sejarah Qigong, Fase awal kemunculan Falun Dafa pada 1992 hingga perspektif pemerintah Tiongkok tentang Falun Dafa. Lalu, pada BAB III peneliti akan lebih berfokus pada fase tengah( kejadian-kejadian penting Falun Dafa dari tahun 1996 hingga dikeluarkannya larangan pada tahun 1999) dan pengaplikasian konsep pelabelan dalam proses



pelabelan yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap isu Falun Dafa di Tiongkok ditahun 1999. Yang terakhir BAB IV yaitu penutupan yang berisi kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya.

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Sisematika Penulisan**

BAB	JUDUL	ISI
BAB I	BAB I PENDAHULUAN	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu Tabel 1.1 1.5 Konsep 1.5.1 Penlabelan 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisa 1.6.3 Ruang Lingkup Batasan Materi Batasan Waktu 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.7 Hipotesa 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	BAB II FALUN DAFA DI TIONGKOK Gambaran Umum tentang sejarah Qigong, Falun Dafa dan alasan pelarangan Falun Dafa	2.1 Sistem Pemerintahan Tiongkok 2.2 Sejarah Qigong 2.3 Fase Awal Falun Dafa(1992-1996) 2.4 Falun Dafa dalam prespektif Pemerintah Tiongkok

BAB III	<p>BAB III ANALISA PROSES SEKURITISASI FALUN DAFA OLEH PEMERINTAH TIONGKOK</p> <p>Analisi Konsep Pelabelan dalam proses pelabelan Falun Dafa oleh pemerintah Tiongkok</p>	<p>3.1 Fase Pertengahan Falun Dafa (1996-1999)</p> <p>3.2 Fase Akhir Falun Dafa(1999)</p> <p>3.2.1.Proses Pelabelan Falun Dafa oleh Pemerintah Tiongkok</p>
BAB IV	<p>BAB IV PENUTUP</p> <p>Berisi ahir dari penelitian yang mencakup kesimpulan, saran penulis bagi penelitian selanjutnya</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>

